

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, terlihat bahwa untuk JARPA II, proses pembentukan kebijakan berbeda dari pemikiran Porter dan Brown. Terlihat dominasi elit politik domestik dengan minimnya peran masyarakat melalui NGO serta sektor industri yang lebih mementingkan sektor usaha lain dibandingkan sektor industri whaling mereka.

Pada dasarnya, sulit untuk menentukan secara spesifik mengenai proses pembuatan kebijakan JARPA II. Hal ini berkaitan dengan kebijakan JARPA II sendiri yang merupakan bagian dari rangkaian program scientific whaling Jepang yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Kondisi ini membuat seringkali informasi mengenai JARPA II tumpang tindih dengan informasi program scientific whaling Jepang pada umumnya. Selain itu, minimnya informasi yang dikeluarkan pemerintah Jepang mengenai data-data industri whaling ataupun data berkaitan dengan kebijakan *scientific whaling* mereka membuat proses pencarian data cukup sulit. Hal ini ditunjang dengan sedang memanasnya isu whaling saat ini di Jepang akibat tuntutan hukum oleh Greenpeace kepada pemerintah Jepang.

Merujuk pada tabel indikator yang dipaparkan di BAB I, maka secara singkat dapat dipaparkan mengenai motivasi Jepang mengeluarkan program JARPA II berdasarkan kerangka pemikiran Porter dan Brown.

Tabel 4.1 Hasil Penelitian berdasarkan Indikator Porter dan Brown

Indikator	Hasil
- bentuk sistem politik: demokratis atau tidak	Bentuk sistem politik Jepang adalah demokratis ala Jepang.
- kekuatan kelompok lobi dalam isu lingkungan tersebut	Kekuatan kelompok lobi pro-whaling sangat kuat. Namun kelompok lobi tersebut sendiri merupakan aktor-aktor inti dalam tubuh LDP.
- Tinggi rendahnya profit yang dihasilkan kebijakan lingkungan tersebut terhadap negara dan industri domestik.	Profit yang didapat oleh ICR rendah. Profit yang didapat negara minus.
- kuat lemahnya kaitan antara kelompok ekonomi dengan birokrasi	Ada aktor-aktor sektor industri whaling yang memiliki kedekatan dengan birokrasi.
- jumlah NGO lokal yang mengusung isu	- Jumlah NGO lingkungan lokal yang mendukung kebijakan scientific whaling sangat rendah, selebihnya merupakan NGO non-lingkungan.
- keterwakilan NGO lokal dalam elektoral	- Secara umum, keterwakilan NGO lingkungan melalui partai politik hampir tidak ada. Untuk isu whaling, tidak ada partai yang merupakan perpanjangan tangan ataupun koalisi NGO lingkungan lokal yang membawa isu whaling.
- kuat lemahnya hubungan antara NGO internasional dengan NGO lokal dan masyarakat lokal.	- Hubungan antara NGO lingkungan dengan NGO lokal dan masyarakat untuk isu JARPA II sangat rendah.
- kuat-lemahnya kelompok think tanks yang meriset tentang isu lingkungan	- kelompok epistemik secara berkala meneliti tentang isu scientific whaling Jepang, termasuk JARPA II. Kelompok epistemik berpengaruh dalam rezim, namun tidak menjadi jaminan kuatnya posisi kelompok epistemik dalam mempengaruhi hasil kebijakan berkaitan dengan scientific whaling.
- kuat – lemahnya reaksi negara terhadap hasil riset tersebut	- Pemerintah Jepang menolak hasil riset kelompok epistemik yang menentang

	JARPA II.
- kuatnya lobi politik dari MNC terhadap pemerintahan maupun partai politik.	- ada kedekatan antara sektor industri dengan LDP untuk isu whaling, namun sejak berlakunya moratorium, hubungan tersebut semakin melemah.
- kuatnya tekanan ekonomi terhadap negara oleh MNC yang mampu mempengaruhi kondisi perekonomian domestik	- kurang data mengenai tekanan MNC terhadap negara untuk mengeluarkan kebijakan JARPA II. Namun terlihat dampak negatif terhadap MNC pasca diberlakukannya JARPA II.

Jepang merupakan negara demokratis, namun terdapat perbedaan signifikan dengan negara demokratis lainnya. Sesuai inti negara demokrasi, terdapat pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif dengan keberadaan partai politik sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dengan pemilu yang diadakan berkala. Namun di sisi lain terdapat perbedaan signifikan:

1. adanya dominasi partai tertentu, LDP, dalam pemerintahan, yang telah berkuasa selama lebih dari lima dekade.
2. adanya tumpang tindih peran antara organ pemerintahan dengan organ LDP.
2. minimnya akses masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Peran LDP yang kuat juga berfungsi sebagai aktor lobi politik kebijakan – kebijakan berkaitan isu whaling, termasuk JARPA II. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan tokoh kunci LDP yang memiliki pandangan pro-whaling menjadi pertimbangan kuat pengambilan kebijakan pemerintah dalam isu whaling. Hal ini diperkuat dengan struktur pengambilan kebijakan pemerintah Jepang yang sangat didominasi elit birokrasi.

Dari segi NGO lingkungan, secara umum, jumlah NGO lingkungan yang memiliki posisi khusus mengenai kebijakan whaling Jepang sangat sedikit. Untuk NGO yang mendukung kebijakan *scientific whaling* Jepang, sebagian besar merupakan organisasi non-lingkungan. Sedangkan untuk NGO lingkungan yang menentang kebijakan *scientific whaling*, jumlahnya hanya sedikit, yang terdeteksi hanya dibawah 10 NGO lingkungan. Lebih lanjut, banyak NGO lingkungan yang tidak mau terlibat dengan isu *whaling* Jepang. Jumlah dukungan masyarakat terhadap NGO-NGO tersebut menjadi indikator seberapa jauh dukungan masyarakat terhadap isu. Sedikitnya jumlah dukungan terhadap NGO lingkungan yang mendukung maupun menentang kebijakan *scientific whaling* Jepang menunjukkan minimnya minat masyarakat terhadap isu tersebut.

NGO lingkungan internasional mengalami kesulitan bekerja sama maupun menggerakkan NGO lingkungan atau masyarakat lokal dalam menanamkan norma anti *scientific whaling* dikarenakan adanya faktor kultural. Hal ini menyebabkan NGO lingkungan internasional lebih banyak bergerak di level internasional, menggunakan pengaruhnya untuk menekan sektor industri. Di sisi lain, untuk hubungan antara NGO lingkungan lokal dengan organisasi induk di level internasional, untuk *scientific whaling*, terlihat adanya pola hubungan tersendiri. Pertama, NGO lokal yang mengadopsi norma sama dengan NGO lingkungan internasional. Kedua, NGO lokal yang mengadopsi norma berbeda dengan NGO lingkungan internasional. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan dari segi pendanaan operasional NGO lingkungan lokal.

Kelompok *think thanks* internasional cukup vokal dalam menyampaikan

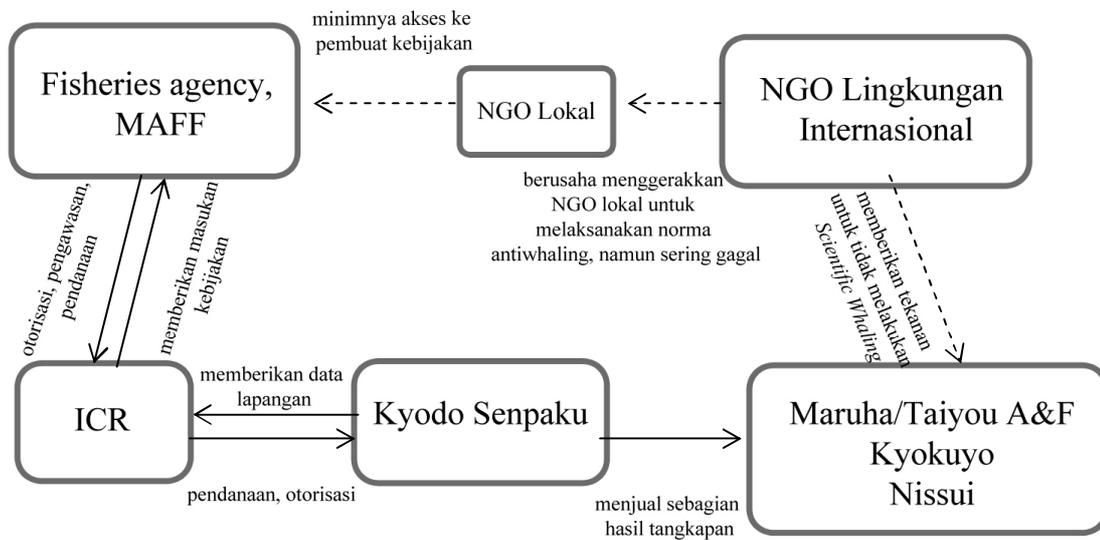
keberatan mereka terhadap kebijakan *scientific whaling* Jepang pada umumnya dan JARPA II pada khususnya. Melalui kerangka IWC maupun media, kelompok epistemik berusaha menentang program JARPA II. Namun terlihat pemerintah Jepang tidak mendengarkan pemikiran kelompok epistemik tersebut. Lebih lanjut, pemerintah Jepang terlihat hanya bergantung kepada ICR sebagai kelompok *think tanks* yang sangat dominan dalam pembuatan kebijakan JARPA II.

Sedangkan dari sektor ekonomi, berdasarkan data hasil kebijakan *scientific whaling* Jepang dari 1988 – 2003, terlihat keuntungan yang cukup sedikit program tersebut. Bahkan keuntungan yang didapat cenderung lebih sedikit dari besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah Jepang untuk program tersebut. Minimnya profit yang didapat sepanjang dilaksanakannya *scientific whaling* bertolak belakang dengan peningkatan kapasitas program JARPA II. Semakin besar kapasitas JARPA II, maka semakin besar subsidi yang dikeluarkan pemerintah Jepang, dengan hasil akhir yang masih belum pasti.

Untuk sektor industri, penarikan kepemilikan *Kyodo Senpaku* oleh *Maruha* pada 1999 menunjukkan sudah adanya keenganan dari sektor industri untuk terus melanjutkan industri whaling mereka. Sulit ditemukan data mengenai peran sektor industri berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan JARPA II. Hal yang menarik adalah baik *Taiyou A&F*, *Kyokuyo*, dan *Nissui* mulai ekspansi usaha mereka lebih dalam di level internasional sejak awal dekade 2000an. Di kemudian hari, terlihat bahwa ekspansi usaha tersebut menjadi batu sandung kebijakan JARPA II, dengan ditariknya seluruh saham *Taiyou A&F*, *Kyokuyo*, dan *Nissui* dari *Kyodo Senpaku*.

Mengenai alur kerjasama antara aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan

JARPA II, dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa hipotesis tidak seluruhnya terbukti. Pembentukan kebijakan JARPA II didominasi oleh sektor domestik, namun tidak menunjukkan adanya pengaruh positif dari gerakan lingkungan lokal, NGO internasional, serta sektor industri. Lebih lanjut, adanya sentimen historis dan tradisi yang menjadi norma yang dipegang oleh elit membuat proses pembuatan kebijakan JARPA II. Pada akhirnya, hal ini berkaitan pula dengan anggapan elit birokrasi Jepang bahwa isu whaling bukanlah isu lingkungan, itu adalah isu perikanan. Sehingga tidak mengherankan jika NGO lingkungan sulit terlibat dalam isu tersebut.

Pada akhirnya, program JARPA II telah diputuskan dan dilaksanakan. Berbagai dampak negatif yang dihasilkan program tersebut tampak tidak menyusutkan niat Jepang untuk meneruskan program JARPA II. Ditunjang dengan

semakin kuatnya posisi poros pro-whaling dalam IWC, tampaknya isu whaling akan tetap dinamis sampai tahun-tahun ke depan. IWC akan tetap menjadi lahan perebutan pengaruh antara poros anti dan pro whaling. Jepang pun akan terus mempertahankan kebijakan *scientific whaling*-nya, jika tidak terjadi perubahan mendasar dalam tubuh pemerintahan Jepang.

Studi kasus mengenai kebijakan JARPA II Jepang diharapkan menunjukkan sisi lain dari kebijakan lingkungan negara. Hal yang paling mendasar adalah tidak selamanya suatu isu yang dianggap sebagai isu lingkungan oleh masyarakat internasional dianggap isu lingkungan juga oleh negara. Bahwa peran NGO lingkungan dalam mempengaruhi kebijakan negara tidaklah hanya melalui jalur elektoral ataupun melalui dukungan kelompok epistemik, tapi dengan memberikan tekanan eksternal melalui masyarakat internasional. Proses ini membutuhkan waktu lama dan dana yang tidak sedikit, namun menjadi hal yang paling memungkinkan untuk negara dengan peran elit birokrat kuat seperti Jepang.